



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG  
NOMOR : 100.3.2/14 /KPTS/35.07.100/2026**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 9  
TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan disampaikannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, oleh Wakil Bupati Malang dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang pada Hari Senin Tanggal 30 Maret 2026;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, perlu dibentuk Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

- Memperhatikan : 1. Jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Bulan April 2026;
2. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, oleh Wakil Bupati Malang dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang pada Hari Senin Tanggal 30 Maret 2026;
3. Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang pada Selasa Tanggal 14 April 2026;
4. Penyampaian Tanggapan dan/atau Jawaban Bupati Malang terhadap Pemandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Malang atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, pada Hari Selasa Tanggal 22 April 2026;
5. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang pada Hari Selasa Tanggal 22 April 2026 dengan agenda Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
**KESATU** : Pembentukan Panitia Khusus pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- KEDUA : Susunan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana diktum KESATU, selengkapnya terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan fungsi Panitia Khusus sebagaimana diktum KESATU adalah membahas, membuat Laporan hasil pembahasan, dan menyampaikan dalam Rapat Paripurna.
- KEEMPAT : Segala bentuk biaya yang diakibatkan dari pelaksanaan kegiatan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang pada DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Malang.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir 1 (satu) tahun setelah ditetapkan dan/atau setelah penyampaian laporan Panitia Khusus atas hasil pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Ditetapkan di Kapanjen

Pada tanggal 22 April 2026

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MALANG**



Ketua,

**DARMADI**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 DAERAH KABUPATEN MALANG  
 NOMOR : 100.3.2/14 /KPTS/35.07.100/2026  
 TENTANG :  
 PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS  
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN MALANG NOMOR 9 TAHUN 2018  
 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK  
 DAERAH.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS**

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1.	MUHAMMAD UKASYAH ALI MURTADHO	Ketua	FRAKSI PARTAI GERINDRA
2.	SYAIFUL ROSYID, S.E., M.Si.	Wakil Ketua	FRAKSI PKS HANURA DEMOKRAT
3.	MUCHAMMAD HAFIDZ	Anggota	FRAKSI PDI PERJUANGAN
4.	SIH PURWANINGTYASTUTI, S.H.	Anggota	FRAKSI PDI PERJUANGAN
5.	IMAM SUP'I	Anggota	FRAKSI PDI PERJUANGAN
6.	H. ALI MURTADLO, S.H.	Anggota	FRAKSI PKB
7.	Hj. MASFUFAH, S.Pd.	Anggota	FRAKSI PKB
8.	FITRI YUHANA	Anggota	FRAKSI PARTAI GERINDRA
9.	SURYA HANTA	Anggota	FRAKSI PARTAI GOLKAR
10.	Dr. MISKAT, S.H., M.H.	Anggota	FRAKSI PARTAI GOLKAR
11.	H. ACHMAD ANDI, S.H, M.Hum.	Anggota	FRAKSI PARTAI NASDEM

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN MALANG**



Ketua,

**DARMADI**